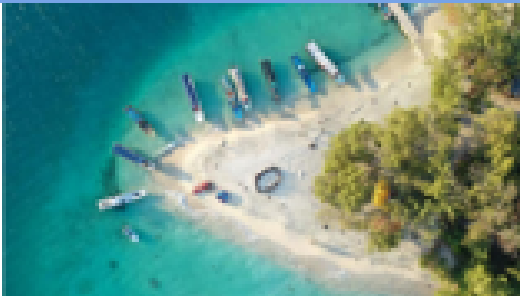
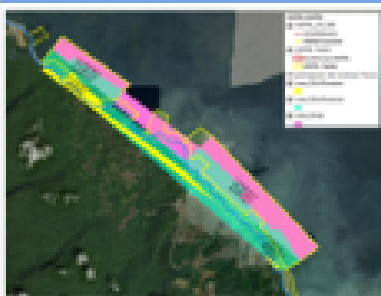


LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2026



DIREKTORAT JASA BAHARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Bahari Triwulan I Tahun 2026 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Bahari dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari selama Triwulan I Tahun 2026 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Bahari.

Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Bahari.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Bahari diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 April 2026

Direktur Jasa Bahari



Enggar Sadtopo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Bahari Triwulan I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Bahari dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Bahari dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja Direktorat Jasa Bahari terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 112,00 (Istimewa).

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Bahari terdiri atas 4 (empat) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada Triwulan I ini terdapat 2 target capaian indikator kegiatan, yaitu :

1. IKK 9 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari dengan target 81% tercapai 99,50% atau sebesar 120%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI.	5
1.2. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari. Aspek Strategis Organisasi	5
1.3. Isu Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JASA BAHARI 2026	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA.	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
3.1.1. IKK 1 LOKASI PEMANFAATAN BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT	11
3.1.2. IKK 2 LOKASI YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN REKLAMASI	12
3.1.3. IKK 3 KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA	14
3.1.4. IKK 4 PERSENTASE KARBON BIRU YANG TEREKISTER	16
3.1.5. IKK 5 PRESENTASE PENYELESAIAN PERIJINAN BERUSAHA JASA BAHARI (%)	21
3.1.6. IKK 6 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI)	23
3.1.7. IKK 7 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (DOKUMEN)	25
3.1.8. IKK 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (INDEKS)	26
3.1.9. IKK 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT JASA BAHARI (%)	27
3.1.10. IKK 10 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (%)	29
3.1.11. IKK 11 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI)	29
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	9
Tabel 2. Target dan Capaian Triwulan I2026.....	10
Tabel 3. Capaian IKK Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha).....	11
Tabel 4 Capaian IKK Kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut (Kawasan)9.	12
Tabel 5 Capaian IKK Persentase Pengendalian Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi (%).....	15
Tabel 6 Capaian IKK Nilai Efektivitas Pengelolaan Wisata Bahari (Nilai).....	16
Tabel 7 capaian IKK Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Bahari (%).....	21
Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (nilai).....	24
Tabel 9. Capaian IKK Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%).....	25
Tabel 10. Capaian IKK Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen).....	26
Tabel 11. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (indeks).....	28
Tabel 12. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%).....	29
Tabel 13. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari...	30
Tabel 14 Capaian IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai).....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari, penyediaan prasarana dan sarana Jasa Bahari, dan perizinan Jasa Bahari;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari, penyediaan prasarana dan sarana Jasa Bahari, dan perizinan Jasa Bahari;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari, penyediaan prasarana dan sarana Jasa Bahari, dan perizinan Jasa Bahari;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari, penyediaan prasarana dan sarana Jasa Bahari, dan perizinan Jasa Bahari;
- e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan Jasa Bahari, penyediaan prasarana dan sarana Jasa Bahari, dan perizinan Jasa Bahari; dan
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Bahari berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Bahari adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Bahari memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPK telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimalnya 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusaha Jasa Bahari, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
4. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
5. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;
6. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan Jasa Bahari untuk peningkatan nilai ekonomi; salah satunya melalui pemanfaatan karbon biru sebagai salah satu fungsi ekosistem pesisir dan laut yang perlu dikelola dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir melalui perdagangan karbon.

8. Perlunya peta perdagangan karbon untuk meningkatkan potensi penyerapan karbon tinggi dan mendorong keberlanjutan ekosistem.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Bahari 2026

Visi, misi, dan tujuan Direktorat Jasa Bahari mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.

Visi Direktorat Jasa Bahari mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Jasa Bahari dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Bahari dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumberdaya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber

pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sistem utama pembangunan nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor. Ekologi sebagai panglima

2. Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau – pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan;

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjaab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis, sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan dan perikanan Indonesia di pasar global.

4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan, yaitu:

- a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
- b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
- c. Integratif, melalui sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan
- d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antarwilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan

Empat pendekatan pembangunan ekonomi biru dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Baru

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Bahari dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan dengan indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi);
 - b. Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi);
 - c. Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan).
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)
3. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)
4. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Jasa Bahari dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai);
 - b. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen);
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks);
 - d. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Jasa Bahari (%);
 - e. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%);
 - f. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Bahari melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa Bahari untuk mencapainya dalam tahun 2026.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Bahari Tahun 2026 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Bahari yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

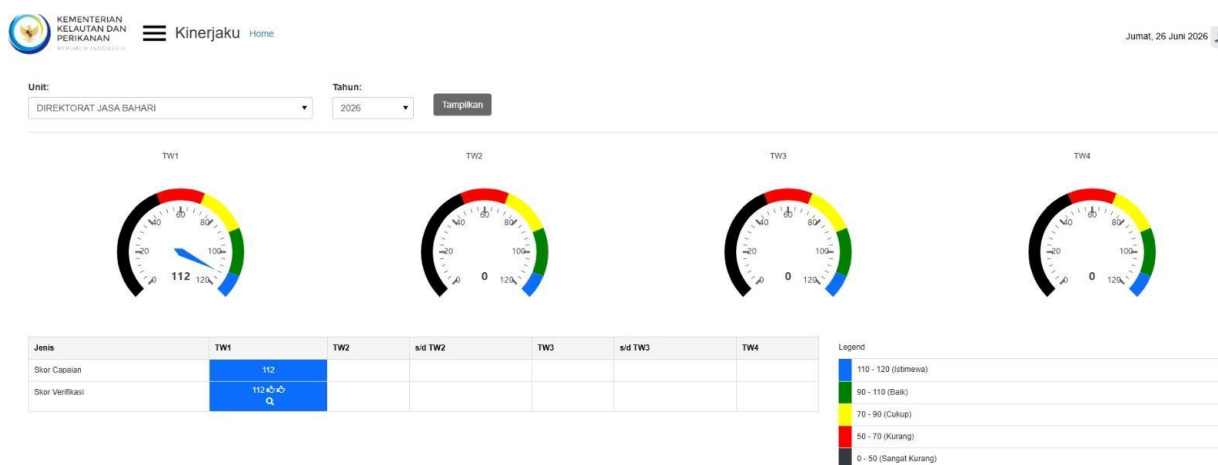
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan	1.	Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)	1
		2.	Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)	3
		3.	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan	4.	Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)	100
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Bahari tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Bahari triwulan I tahun 2026 adalah 112,00% (Baik) untuk indikator pada kinerjaku.



Tabel 2. Target dan Capaian Triwulan I 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW-1	CAPAIANT W-1	%
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan	1.	Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)	-	-	-
		2.	Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)	-	-	-
		3.	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW-1	CAPAIANT W-1	%
2.	Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan	4.	Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)	-	-	-
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)	-	-	-
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)	81	99,50	120
		7.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	-	-	-
		8.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	-	-	-
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)	1	1	100
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks)	-	-	-
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	-	-	-

3.1.1. IKK 1 LOKASI PEMANFAATAN BANGUNAN DAN INSTALASI LAUT YANG SUDAH TIDAK BEROPERASI (LOKASI)

Bangunan dan Instalasi laut adalah setiap konstruksi baik yang berada di atas dan/atau dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.

Terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut terkait dengan fasilitasi perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut, unit teknis akan menguji kelengkapan persyaratan tersebut, dan apabila secara teknis telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku selanjutnya memberikan persetujuan teknis berupa dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut. Pemanfaatan bangunan dan instalasi laut yang sudah tidak beroperasi adalah proses penggunaan kembali, modifikasi, alih fungsi, atau konversi struktur dan bangunan laut (seperti rig minyak, *platform*, dermaga, atau bangunan lepas pantai) yang tidak lagi aktif atau operasional untuk tujuan baru, baik secara ekonomi, ekologis, maupun sosial.

Teknik Menghitung: Menginventarisasi dan menghitung jumlah kawasan pemanfaatan bangunan dan instalasi laut yang didirikan dan/atau dibongkar sesuai dengan perizinan yang telah terbit dan/atau jumlah bangunan dan/atau instalasi laut yg sudah tidak beroperasi yang difasilitasi pengelolaannya baik melalui perencanaan, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi

Tabel 3. Capaian IKK Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)

SS - 1		Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan						
IKK - 1		Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)						
Tahun 2025		Tahun 2026*					Renstra DJPRL 2026-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	1	1	3

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada).

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

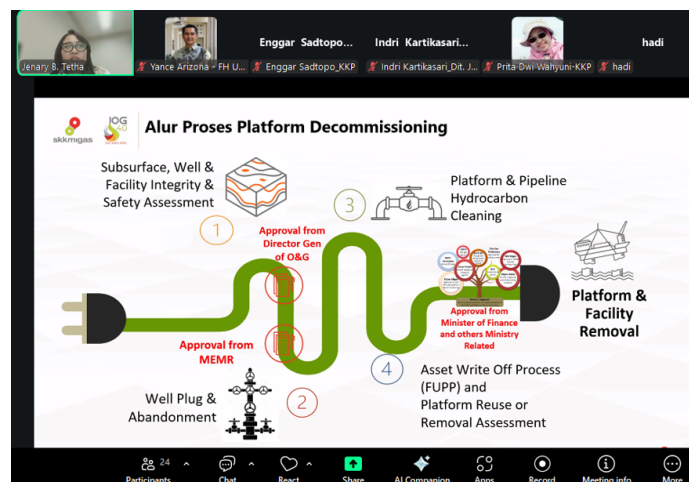
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

F. Kegiatan Pendukung:

- 1) FGD Terbatas Penyusunan Naskah Urgensi dan RPP tentang Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai Pasca Operasi Menjadi Terumbu (*Rig to Reefs*) dan Budidaya Ikan (*Rig to Fish Farm*)

Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2026 secara daring melalui zoom meeting, dan dibuka oleh Direktur Jasa Bahari dan dihadiri Perwakilan SKK Migas, BPD LH, Fakultas Hukum-Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (IPB), Hadi Pramono, S.E, M.Si-APJK Ahli Utama, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan, Ketua Timja Pengelolaan Wisata Bahari-Dit. Jasa Bahari, Timja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut-Dit Jasa Bahari, Pejabat Fungsional APJK/PELP lingkup Dit. Jasa Bahari. Rapat bertujuan untuk menjaring masukan dan informasi terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai (AMLPP) Pasca Operasi Menjadi Terumbu (*Rig to Reefs*) dan Budidaya Ikan (*Rig to Fish Farm*).

Pembahasan Naskah Urgensi sudah dilakukan tahun 2025 dan tahun 2026 rencana akan dilakukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah serta diajukan izin prakarsanya. Dana KPO hanya bisa dipergunakan untuk pekerjaan KPO berdasarkan pada lingkup kerjanya yang disetujui SKK Migas. Dalam hal pembuatan rekening bersama antara SKK Migas dan Pengusaha Perikanan tidak memungkinkan dilakukan karena tidak termasuk dalam kegiatan usaha hulu migas. Dalam terminologi Dana Kegiatan Pasca Operasi (KPO) memiliki definisi, ruang lingkup dan pos anggaran yang identik dengan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan K/L lainnya.



- 2) Audiensi dan Diskusi Teknis dengan SKK Migas tentang RPP Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai Pasca Operasi Menjadi Terumbu (*Rig to Reefs*) dan Budidaya Ikan (*Rig to Fish Farm*)

Kegiatan audiensi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026 di Kantor SKK Migas Wisma Mulia Lantai 22. Rapat dibuka Ibu Jenary B. Tetha, Analis Senior ASR & Decommissioning SKK Migas dan dihadiri Tim SKK Migas (Haekal, Arif, Ronald, Adit, Fatihah, Erwin (Legal), Roki (Pokja Maritime & Shipping), Win (Treasury), Tim KKP (Ketua Timja Pengelolaan Wisata Bahari, Ketua Timja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut, Timja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut) dan Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC). Audiensi dan diskusi teknis bertujuan sebagai forum diskusi dan pertukaran pandangan terkait aspek teknis, operasional, keselamatan, serta kebijakan hulu migas yang berkaitan dengan pengelolaan anjungan minyak lepas pantai pasca operasi,

dengan harapan substansi RPP yang disusun dapat selaras dengan praktik terbaik industri hulu migas, prinsip keselamatan operasi, serta pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan.

Rig to Reefs telah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan di SKK Migas dalam pengelolaan fasilitas migas pasca operasi, sehingga kondisi ini merupakan peluang strategis untuk mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) guna memberikan kepastian hukum dan mekanisme implementasi. Kebijakan *Rig to Reefs* memiliki peluang untuk dikembangkan di Indonesia, namun memerlukan penguatan aspek regulasi lintas sektor, khususnya terkait status aset negara, mekanisme pengalihan tanggung jawab, dan kesesuaian dengan ketentuan pelayaran. Diperlukan kejelasan mekanisme pendanaan dan liability agar dapat diterima oleh operator migas dan pemangku kepentingan lainnya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah (i) Melaksanakan konsultasi lanjutan dengan Kementerian ESDM, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Kementerian Keuangan, (ii) Mengidentifikasi kebutuhan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata, dan (iii) Menyusun pengaturan terkait mekanisme *transfer of liability* dan skema pemanfaatan aset dalam draf kebijakan *Rig to Reefs*.



3) Koordinasi Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Bangunan Laut.

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2026 yang dipimpin oleh Katimja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut yang dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin, Ditjen PRL, Bagian Data Ditjen PK dan Direktorat Jasa Bahari. Sesuai dengan Rencana Aksi IGT DJPK 2026 target tahun 2026 adalah Draft SDP dalam bentuk Standar Produk Informasi Geospasial (SPIG) Bangunan dan Instalasi Laut. Namun demikian secara paralel tetap dilakukan pengumpulan data dan pengembangan *database*. Dalam rapat juga disepakati *timeline* penyusunan draft SPIG Bangunan dan Instalasi Laut.

4) Koordinasi Penyusunan MoU antara KKP dan PLN

Rapat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2026, yang dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jasa Bahari. Tujuan rapat adalah untuk melakukan koordinasi dan pembahasan awal mengenai substansi serta mekanisme penyusunan dokumen MoU antara KKP dan PLN yang direncanakan untuk ditandatangani dalam rangkaian kegiatan Ocean Impact Summit (OIS) di Bali, dimana OIS akan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juni 2026. MoU tersebut diharapkan menjadi landasan kerja sama strategis antara kedua institusi dalam mengembangkan peluang dan potensi penggunaan LNG untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, MoU disusun dengan tujuan dan ruang lingkup yang lebih umum tidak hanya untuk LNG namun juga penggunaan energi listrik dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah potensi pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai sumber energi alternatif untuk mendukung operasional sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan LNG dipandang memiliki potensi untuk menyediakan energi yang relatif lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan sumber energi

konvensional yang selama ini digunakan di beberapa fasilitas perikanan. Dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, khususnya terkait dengan ketersediaan lahan yang sesuai untuk pembangunan fasilitas penyimpanan dan distribusi LNG di lokasi-lokasi strategis. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut serta koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa pengembangan infrastruktur LNG dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagai langkah awal implementasi kerja sama, direncanakan pelaksanaan pilot project pada beberapa lokasi yang dianggap memiliki potensi untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan sektor perikanan. Dalam proses penentuan lokasi tersebut, diperlukan analisis spasial yang mempertimbangkan kedekatan lokasi dengan jaringan listrik PLN yang sudah tersedia.

Hasil kesepakatan dalam rapat antara lain adalah (i) Kedua pihak akan segera melaksanakan rangkaian pertemuan lanjutan (serial meeting) antara KKP dan PLN guna membahas lebih lanjut substansi kerja sama serta menentukan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi lokasi implementasi pilot project, (ii) Penunjukan PIC koordinasi antara KKP dan PLN untuk mempercepat proses penyusunan dan finalisasi dokumen kerja sama. Dari pihak PLN, kontak person adalah ibu Sania yang menjadi PIC koordinasi lebih lanjut terkait MoU, (iii) Dokumen MoU perlu melalui proses reviu dan penelaahan oleh Biro Hukum KKP guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (iv) Apabila terdapat revisi atau penyempurnaan substansi dokumen MoU, diharapkan proses perbaikan dapat diselesaikan paling lambat sebelum bulan Mei 2026 agar saat pelaksanaan Road to OIS di bulan Mei nanti sudah tinggal persetujuan dokumen MoU nya.

Tindak lanjut dari rapat ini adalah (i) Biro perencanaan KKP akan menginisiasi rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan para pejabat eselon II di lingkungan KKP bersama dengan pihak PLN guna membahas lebih lanjut muatan substansi kerja sama dalam MoU, dan (ii) Direktorat jasa Bahari akan melaksanakan rapat dengan pihak PLN dan unit eselon 2 lingkup KKP untuk membahas lebih lanjut terkait substansi yang lebih teknis untuk turunan MoU.



5) Pembahasan Usulan Lokasi R2F

Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026, yang dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jasa Bahari. Rapat dihadiri oleh Stafsus MKP Bidang PSDKP, perwakilan SKK Migas dan DJPB, dengan agenda utama masukan terkait dengan lokasi potensial sebagai bahan rapim dengan Wakil Menteri KP terkait dengan pengembangan dan implementasi R2FF. Terdapat beberapa opsi lokasi untuk R2FF oleh SKK Migas, diantaranya adalah Attaka I oleh Pertamina di Kaltim, Blok Pagerungan (PGC7) oleh Kangean Energy Indonesia/KEI di Kangean Jatim, serta Platform MSN Field oleh EMP Mallacan Strait di perairan sekitar Pelalawan Riau. BRSDMKP pada waktu sebelumnya telah melakukan kajian awal R2FF yaitu di Attaka I PHKT (kaltim), PGC 7 KEI (Kangean Jatim), dan Duma, Kitty dan Retno di PHE OSES (Kep. Seribu

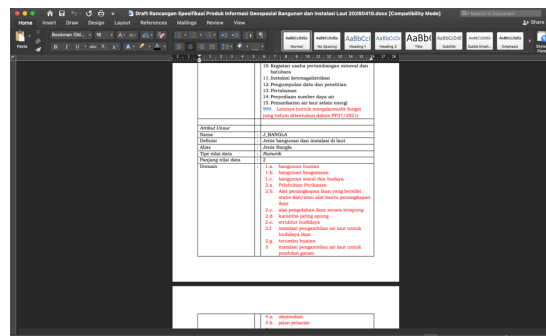
DKI), dengan temuan bahwa aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan R2FF adalah market/pasar. DJPB menyusun kajian kesesuaian lokasi budidaya >12mil pada tahun 2025, kriteria teknis kesesuaian budidaya oleh DJPB dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan lokasi R2FF. Selain kesesuaian lokasi untuk budidaya cost dan aksesibilitas pakan juga perlu menjadi pertimbangan.

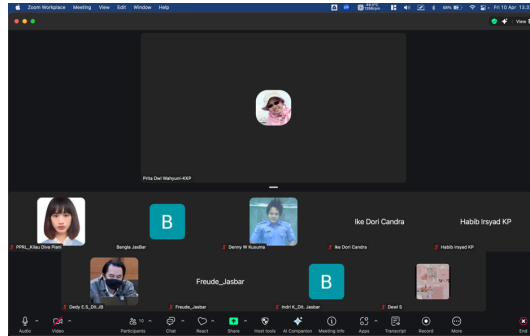
Dari diskusi dan pembahasan bersama, berdasarkan informasi SKK Migas dan Kajian yang sebelumnya telah dilakukan BRSDMKP maka lokasi potensial R2FF adalah sebagai berikut (i) Platform ATAKA I – PHKT di Selat Makassar, Kalimantan Timur, (ii) Platform PGC7 Blok Pagerungan – Kangean Energy Indonesia (KEI) di perairan Kangean, Jawa Timur, (iii) Platform MSN Field – EMP Mallacan Strait di Selat Malaka, Pelalawan, Riau, (iv) Platform Duma, Kitty dan Retno – PHE OSES di Kep. Seribu DKI Jakarta. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan dilakukan (a) *sharing* data dan informasi lokasi oleh SKK Migas, (b) *sharing* data dan informasi oleh DJPB, (c) *overlay / screening* cepat kesesuaian lokasi budidaya terhadap lokasi potensial R2FF menggunakan kriteria teknis DJPB, dan (d) penyiapan/*updating* materi Rapim terkait R2FF bersama Wamen KP.



6) Pembahasan Spesifikasi Produk Data (SPD) Informasi Geospasial Tematik (IGT) Bangunan dan Instalasi Laut (10 April 2026).

Rapat dilaksanakan pada tanggal 10 April 2026 yang dipimpin oleh Katimja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut yang dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin, Ditjen PRL, Bagian Data Ditjen PK dan Direktorat Jasa Bahari. Dalam rapat dibahas substansi draft SPD IGT Bangla yang telah disusun oleh tim internal Timja Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut. Beberapa perbaikan draft SPD IGT Bangla adalah (i) Melengkapi fungsi dan jenis bangla sesuai PP27/2021, serta memperhatikan pengaturan di K/L lain, (ii) Menambahkan geometri polygon, dan kriteria geometri untuk fitur, dan (iii) Perbaikan simbologi menjadi “unique”.





7) Koordinasi Pengembangan dan Penyusunan Sistem Identifikasi Informasi Bangunan dan Instalasi di Laut dengan UGM

Koordinasi ke Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta pada tanggal 28-29 April 2026, dimana dari Fakultas Geografi UGM diwakili oleh Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs. Koordinasi utamanya membahas tentang pendekatan prosedur mekanisme rencana pelaksanaan pekerjaan, serta pendekatan konseptual dan teknis penyusunan. Fakultas Geografi UGM siap mendukung pelaksanaan penyusunan Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan Reklamasi dan Identifikasi Bangunan dan Instalasi di Laut.

Sistem informasi direncanakan disusun dengan muatan sebagai berikut (i) Fungsi analisis (internal) meliputi Identifikasi sebaran & pemantauan kegiatan/objek reklamasi, Identifikasi sebaran objek bangunan dan instalasi di laut, Overlay status perizinan (KKPRL dan Reklamasi), Tools terkait: input lokasi, hitung jarak/luasan; (ii) Fungsi Publikasi meliputi - Informasi sebaran kegiatan/objek reklamasi, Informasi sebaran objek bangunan dan instalasi di laut, Informasi wilayah kewenangan perairan, Tools terkait: input lokasi, hitung jarak/luasan; dan (iii) Terintegrasi dengan kbp.go.id. Monitoring Pelaksanaan Reklamasi dan Identifikasi Bangunan dan Instalasi di Laut akan dilakukan dengan menggunakan platform utama *Google Earth Engine* (GEE), dengan pendekatan utama menggunakan kombinasi analisis MNDWI (*Modified Normalized Difference Water Index*) dan NDBI (*Normalized Difference Built-Up Index*). Sehubungan dengan penggunaan platform GEE maka terdapat potensi kebutuhan biaya bulanan untuk penggunaan *resource Earth Engine* (unit komputasi dan penyimpanan) yang perlu dialokasikan anggarannya. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah (i) Koordinasi terkait dengan alokasi anggaran pelaksanaan penyusunan Sistem Informasi lingkup internal Dit. Jasa bahari, dan (ii) Koordinasi persiapan dukungan tenaga ahli/narasumber dan Swakelola Tipe 2.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

1. Persiapan Pelaksanaan International Workshop Rig Reutilization
2. Koordinasi, penyusunan, dan pembahasan draft SPD IG Bangunan Laut
3. Pembahasan dan penyampaian masukan draft IA Rigs to LNG CCS
4. Fasilitasi potensi alternatif dan inisiatif decommissioning

3.1.2. IKK 2. LOKASI YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN REKLAMASI (LOKASI)

Direktorat Jasa Bahari memiliki salah satu tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Definisi Reklamasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Kegiatan Reklamasi di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil ini diharapkan dapat mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pada kegiatan reklamasi memiliki tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasi. Pengendalian reklamasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses reklamasi lahan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat diminimalkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dengan perizinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Teknik Menghitung:

Jumlah reklamasi yang dikendalikan perizinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4 Capaian IKK Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)

SS - 1		Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan						
IKK - 2		Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (Lokasi)						
Tahun 2025		Tahun 2026*					Renstra DJPRL 2026-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	1	3	3

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena perhitungan capaian bersifat tahunan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/ Target Nasional/ Target Internasional

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional/ target nasional/ target internasional.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis.

Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan pertama tahun anggaran 2026 IKU ini belum memiliki target sebagai output kegiatan karena untuk lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi memiliki target tahunan dan perhitungan dilakukan di akhir tahun anggaran sebagai total target output 2026.

Analisis Keberhasilan

Pengelolaan reklamasi di tahun anggaran 2026 kembali menitikberatkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan reklamasi. Kegiatan yang direncanakan sebagai upaya pencapaian keberhasilan target output antara lain penyusunan basis data lahan reklamasi, sosialisasi, survey lapangan, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, pelibatan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan dan penyusunan kelengkapan serta perbaikan atas Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terus dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola pelaksanaan reklamasi. Pada triwulan awal di 2026 ini dilakukan tindak lanjut penyusunan aplikasi untuk membantu monitoring kegiatan reklamasi di Indonesia. Aplikasi ini direncanakan dikembangkan dengan kerjasama bersama PUSPICS Universitas Gadjah Mada.

Penyebarluasan data dan informasi dalam pengelolaan reklamasi dilakukan termasuk pemuktahiran informasi terkait peraturan perundang-undangan terbaru dalam kegiatan reklamasi dan sumber material kepada pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dengan adanya penyebaran informasi dan upaya peningkatan operasional kegiatan pengendalian pelaksanaan reklamasi serta penyusunan basis data dalam kegiatan reklamasi, dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi sesuai dengan target output dan outcome dalam pengelolaan reklamasi.

Kendala

Pada Triwulan pertama tahun anggaran 2026, kegiatan pengendalian reklamasi mengalami kendala berupa adanya pemotongan anggaran untuk anggaran yang berasal dari alokasi rupiah murni. Untuk penggunaan anggaran alokasi yang berasal dari PNPB belum dapat dimanfaatkan sehingga kegiatan pengendalian reklamasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Solusi

Pada kegiatan pengendalian reklamasi tidak dapat dilakukan secara maksimal pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2026. Tetapi upaya memaksimalkan sarana dan prasarana yang saat ini tersedia guna pencapaian output kegiatan pengendalian reklamasi tetap dilaksanakan.

Kegiatan Pendukung

Pada Kegiatan Pengendalian Reklamasi di Tahun Anggaran 2026 pada triwulan pertama telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, diantaranya:

1. Pembahasan regulasi reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil

Pembahasan dilaksanakan di Ruang Rapat Padaido yang dihadiri oleh Dirjen Pengelolaan Kelautan, Tim Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil dan Tim Direktorat Jasa Bahari. Pertemuan membahas perkembangan regulasi dalam pengelolaan pesisir dan pulau kecil, terutama dalam kegiatan reklamasi.

2. Koordinasi Tindak Lanjut Usulan Kerjasama Reklamasi dengan PT Tegar Primajaya

Kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut usulan kerjasama yang diajukan oleh pelaku usaha terkait kegiatan rehabilitasi pesisir dengan reklamasi. Dilakukan review terkait PKKPR, muatan area perizinan yang telah dimiliki dan dokumen lainnya yang dioverlay ke dalam peta. Selain itu juga dilakukan koordinasi bersama Tim perwakilan Ditjen Perencanaan Ruang Laut untuk mengetahui proses pengajuan dan pelaporan PKKPR yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dari hasil review, masih diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan pakar pesisir dan pakar hukum untuk mendetailkan terkait area yang dimohonkan.

3. Kegiatan Praktek Penggunaan Drone dalam Pemetaan Pesisir

Kegiatan dilaksanakan di area Kantor Balai Ikan Hias Depok. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melatih setiap pegawai dari beberapa tim kerja lingkup Direktorat Jasa Bahari dalam hal pengoperasian drone type Autel Evo II RTK dalam pemetaan pesisir. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan reklamasi dan layanan berusaha jasa Bahari.



Dokumentasi Pelaksanaan Praktek Penggunaan Drone dalam Pemetaan Pesisir

4. Pembahasan Identifikasi reklamasi hasil pengawasan

Kegiatan dilaksanakan untuk menindaklanjuti area reklamasi hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Ditjen PSDKP. Kegiatan ini mengundang Tim perwakilan Direktorat SDK, Tim perwakilan Ditjen PRL, dan Tim Direktorat Jasa Bahari. Kegiatan ini mengidentifikasi area

reklamasi tidak berizin berdasarkan kewenangan, jenis usaha, ada tidaknya PKKPR dan izin lainnya, serta jenis pelanggaran.

5. Koordinasi Rencana Permohonan Reklamasi Marunda

Direktorat Jasa Bahari menerima permohonan audiensi PT. Tegar Primajaya untuk rencana pelaksanaan rehabilitasi di pesisir dengan menggunakan metode reklamasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan telaah perihal jenis usaha, kewenangan lokasi, izin yang telah diperoleh, dan kajian berdasarkan aspek hukum serta pengelolaan pesisir.

6. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan Reklamasi dengan Google Earth Engine (GEE)

Kegiatan ini menindaklanjuti rencana penyusunan program monitoring dan evaluasi lokasi reklamasi yang didukung oleh teknologi aplikasi pemetaan dan citra. Program ini direncanakan akan dikerjasamakan dengan Tim PUSPICS Fakultas Geografi UGM. Telah dilakukan diskusi untuk memperkaya materi dan lingkup dari aplikasi yang akan disusun. Masih diperlukan diskusi tambahan untuk membahas lebih lanjut lingkup dan proses pengadaan aplikasi yang dapat diakses secara resmi pada tautan website KKP, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat data dan informasi untuk kegiatan reklamasi di internal maupun publik.

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026 di Triwulan II direncanakan beberapa kegiatan pengendalian reklamasi sebagai kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target 2026, diantaranya:

1. Tindaklanjuti penyusunan aplikasi monitoring dan pengendalian gabungan untuk kegiatan reklamasi, instalasi dan bangunan laut.
2. Tindaklanjuti proses Kerjasama Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan di Wilayah Pesisir Jawa Barat.

3.1.3. IKK 3 KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Ditjen Pengelolaan Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kawasan wisata bahari adalah desa atau beberapa desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan yang dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kawasan wisata bahari yang dikelola adalah desa atau beberapa desa wisata bahari yang difasilitasi pengembangannya hasil verifikasi meliputi: tahapan perencanaan, pembinaan, pemberian sarana/prasarana, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi. Kawasan wisata bahari yang dikelola adalah desa atau beberapa desa wisata bahari yang difasilitasi pengembangannya melalui tahapan perencanaan, pembinaan, pemberian sarana/prasarana, kemitraan dan/atau

monitoring dan evaluasi. Kawasan wisata bahari adalah desa atau beberapa desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa Jasa Bahari dan perikanan yang dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung jumlah kawasan wisata bahari yang dikelola melalui penyusunan perencanaan, pembinaan, kemitraan dan/atau monitoring dan evaluasi

Tabel 5 Capaian IKK Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)

SS - 1	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan							
IKK - 3	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)							
Tahun 2025	Tahun 2026*						Renstra DJPRL 2026-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	1	59	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Pada tahun Triwulan I tahun anggaran 2025 telah dilakukan pendataan pengembangan wisata bahari dilakukan melalui evaluasi pemanfaatan Desa Wisata Bahari dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025 mengundang 109 (seratus sembilan) desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) ataupun pernah menerima sarana wisata bahari namun belum ditetapkan sebagai Dewi Bahari.

Pada Triwulan I Tahun 2026 progress capaian Indikator Kinerja Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari telah dilakukan pengelolaan kawasan berupa kegiatan pemantauan dan evaluasi pada kawasan lokasi wisata bahari di Desa Cendi Manik Kab Lombok Barat 25 - 27 Februari 2026 dan Desa Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah 11 - 13 Maret 2026. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan terkait pengembangan sarana prasana Wisata Bahari yang telah diintervensi KKP sejak tahun 2021 hingga 2024 selain di kabupaten Kendal dan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Potensi wisata bahari di Wonokerto telah dikelola dengan mandiri dan menjadi model percontohan bagi pengembangan wisata bahari di Indonesia.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Telah terdapat 2 (dua) kawasan yang dikelola yaitu Desa Cendi Manik dan Desa Wonokerto. Pengelolaan yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada).

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

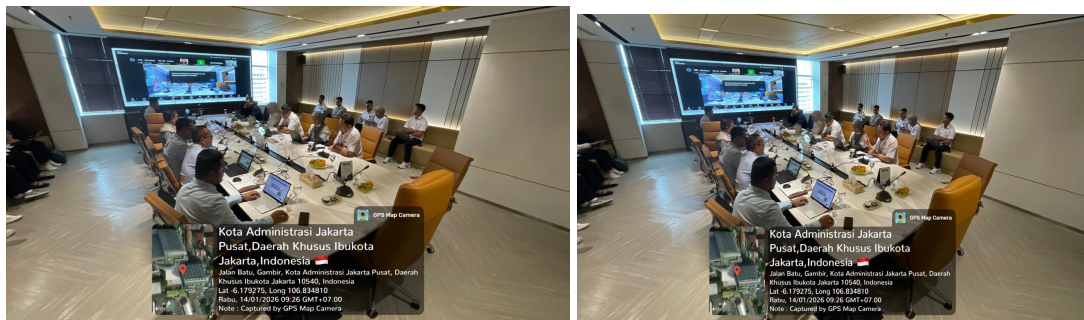
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

F. Kegiatan Pendukung:

1) Pembahasan rencana Pengembangan Wisata Premium Pulau Mangkai

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026 dengan dipimpin oleh Direktur Jasa Bahari dan dihadiri oleh perwakilan Mangkai Conservation and Research Hub dan perwakilan dari Direktorat Jasa Bahari. Tujuan dari pembahasan Pengembangan Wisata Premium di Pulau Mangkai adalah untuk menjadikan Pulau Mangkai sebagai pusat riset dan pengelolaan ekosistem laut di kawasan konservasi inti Kepulauan Anambas. Berbeda dengan pendekatan pariwisata konvensional, Mangkai Conservation and Research Hub menempatkan fungsi riset dan konservasi sebagai aktivitas utama, sementara keberadaan akomodasi bersifat pendukung operasional untuk memungkinkan tinggal jangka menengah hingga panjang bagi peneliti, institusi dan mitra konservasi.

Rencana Pengembangan Mangkai Marine Conservation and Research Hub secara prinsip selaras dengan tata ruang kawasan konservasi, tidak mengubah peruntukan ruang dan tidak meningkatkan intensitas pemanfaatan kawasan. seluruh aktivitas dan infrastruktur dirancang untuk mendukung fungsi penelitian, konservasi dan pengelolaan kawasan secara aktif dengan skala terbatas, serta berbasis daya dukung ekologis.



8) Rapat Koordinasi Data Calon Penerima Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan LAUTRA dengan BPSPDMKP.

Rapat Koordinasi Data Calon Penerima Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan LAUTRA dengan BPSPDMKP dilakukan tanggal 27 Januari 2026 dan dipimpin oleh Katima Pengelolaan Jasa Bahari dan dihadiri oleh perwakilan PMO, World Bank dan Pelaksana Direktorat Jasa Bahari.

Tujuan program LAUTRA berdasarkan *Project Development Objective/PDO* adalah meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut terpilih dan perikanan terumbu karang, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat di wilayah sasaran. Salah satu indikator utama pencapaiannya adalah jumlah usaha pesisir yang memperoleh dukungan pengembangan usaha dan/atau akses pembiayaan, termasuk proporsi usaha yang dipimpin oleh perempuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komponen 2 LAUTRA menghadirkan Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan (DEPB) sebagai instrumen dukungan permodalan bagi usaha pesisir yang layak dan produktif, meliputi sektor perikanan berkelanjutan, pariwisata, akuakultur, agromaritim, serta kegiatan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal pesisir yang dikelola masyarakat. DEPB dirancang sebagai pengungkit pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat posisi dalam rantai nilai, dan mendorong peningkatan kelayakan usaha (*bankability*).

Dalam rangka menjamin tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan, desain kelembagaan DEPB membedakan secara tegas antara lembaga penyalur/pengelola dana dan pelaku usaha penerima manfaat akhir. DEPB disalurkan melalui Lembaga Pengelola Lokal (LPL) yang memenuhi kriteria tata kelola dan akuntabilitas, yang dapat berbentuk koperasi, BUMDes/BUMDesma, lembaga usaha bersama berbadan hukum, atau konsorsium usaha yang dilegalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LPL berfungsi sebagai pengelola pembiayaan, pengendali mekanisme usaha bergulir, serta agregator penguatan rantai nilai ekonomi pesisir.

Penerima manfaat akhir tetap ditujukan kepada coastal enterprises, yaitu UMKM individu, kelompok usaha, unit usaha nelayan, pengolah hasil laut, dan usaha produktif berbasis potensi lokal lainnya yang memiliki rencana usaha jelas dan prospektif. Dengan pemisahan peran tersebut, dukungan modal dapat dikelola secara tertib melalui kelembagaan yang bertanggung jawab, sekaligus memberikan dampak langsung kepada pelaku usaha di tingkat masyarakat.



9) Rapat Koordinasi Data Calon Penerima Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan LAUTRA dengan NGO dan mitra

Rapat Koordinasi Data Calon Penerima Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan LAUTRA dengan NGO dan mitra dilaksanakan tanggal 30 Januari 2026 dengan dipimpin oleh Direktur Jasa Bahari dan dihadiri oleh Katimja Wisata Bahari, NGO dan Mitra yang terlibat dalam perencanaan konsep DEPB (Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan).

Hasil dari pembahasan diharapkan DEPB dilaksanakan menggunakan skema bantuan pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur Bank Dunia. Pemberian DEPB dibatasi pada penerima manfaat yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan, tidak hanya dari aspek administratif dan finansial, tetapi juga berdasarkan keterpaduan dalam rantai nilai usaha dan potensi kontribusinya terhadap penguatan ekosistem ekonomi pesisir. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dukungan pembiayaan menghasilkan peningkatan kapasitas usaha, memperkuat hubungan hulu–hilir, serta menciptakan multiplier effect yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi wilayah pesisir.

Pedoman Pelaksanaan Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan (DEPB) ini dimaksudkan sebagai acuan operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, penetapan, penyaluran, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban DEPB dalam kerangka Komponen 2 Proyek LAUTRA. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan DEPB:

- Dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Selaras dengan kebijakan KKP dan prosedur Bank Dunia;
- Memiliki sistem pengendalian internal dan titik audit yang jelas;
- Menjamin kepastian peran dan tanggung jawab para pihak;

- Mengurangi risiko penyimpangan, ketidakteraturan administrasi, dan inefisiensi penggunaan anggaran.



10) Penyusunan draft Keputusan Menteri KP tentang Penyaluran Dana Ekonomi Produktif

Pembahasan Penyusunan draft Keputusan Menteri KP tentang Penyaluran Dana Ekonomi Produktif pada tanggal 11 Februari 2026 dengan dipimpin oleh Direktur Jasa Bahari. dalam pertemuan ini berhasil di susun draft Kepmen KP tentang Penyaluran DEPB. Adapun tujuan Pedoman Pelaksanaan DEPB adalah untuk; Memberikan ketentuan umum DEPB tentang kelembagaan pelaksana dan tata cara umum pelaksanaan penyaluran DEPB secara terstruktur dan sistematis; Menetapkan kriteria kelayakan lembaga pengelola dan penerima manfaat; Menetapkan mekanisme pengajuan, penilaian, validasi, dan penetapan rencana bisnis; Mengatur mekanisme penyaluran dana melalui sistem yang terkendali dan terdokumentasi; Menjamin pengelolaan rekening khusus dan penggunaan dana sesuai peruntukan; Menyediakan kerangka pengendalian internal, monitoring, evaluasi, dan audit; Memastikan bahwa pelaksanaan DEPB mendukung tujuan penguatan usaha pesisir secara berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan prinsip konservasi Kawasan Konservasi Laut.

11) Evaluasi pemanfaatan bantuan sarana dan pengembangan wisata bahari di Desa Cendi Manik Kab Lombok Barat

Tujuan Kegiatan : Untuk memastikan bantuan sarana prasarana wisata bahari berjalan dengan efektif dan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas wisata bahari, serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat lokal. berikut hasil pemantauan Desa Wisata Bahari di Bagek Kembar, Desa Cendi Mandik, Lombok, NTB :

1. Wisata Mangrove Bagek Kembar saat ini di kelola oleh oleh NGO dari UK bernama Blue Marine Foundation dan bekerjasama dengan yayasan Better Together.
2. Bantuan yang diberikan di tahun 2022 dan 2023 berupa landmark, pondok informasi, penginapan, dan papan informasi terkait potensi wisata mangrove Bagek kembar Lombok, NTB.
3. Saat ini terdapat 7 orang tenaga kerja yang dipekerjakan di Ekowisata Mangrove Bagek Kembar dengan di gaji 2 sampai 2.5 juta perbulan.
4. Jumlah kunjungan yang paling sering yakni untuk penanaman mangrove dan pengambilan foto dan video terkait wisata pengamatan burung di Mangrove yang berasal dari Singapura, Australia dan Norwegia.
5. Tamu-tamu yang Indonesia pada umumnya berasal dari Jakarta, Bali dan Lombok yang berminat pada penanaman Mangrove.
6. Terdapat 4 kamar untuk penginapan yang disewakan sehari Rp.150.000 untuk tamu lokal dan mancanegara, namun hasil keuntungan dan laporan keuangan belum tercatat dengan rapi.
7. Selain itu, dari habitat mangrove ini bisa mendapat 1 Kg kepiting yang dapat terjual 350 ribu per kg

8. Jumlah kunjungan belum tercatat dengan rapi dan time series masih manual dan jarang diperhatikan untuk dicatat apabila ada tamu yang datang.
9. Terdapat Facebook, Instagram dan Tik Tok yang mempromosikan ekowisata mangrove bagek kembar.
10. Kelemahan yang ada yakni belum adanya kelompok pengelola wisata berbasis desa sehingga tidak ada peran desa dalam pengembangan pengelolaan eko wisata bahari mangrove Bagek Kembar.



12) Penyusunan rencana partisipasi OIS 2026 dalam bentuk Identifikasi Peluang Investasi Wisata Premium Pulau Mangkai, Kab Kepulauan Anambas

Pembahasan penyusunan rencana OIS 2026 dalam bentuk identifikasi peluang investasi Wisata Premium Mangkai di Anambas dilakukan dalam rangka penguatan publikasi penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 Juni 2026 di Provinsi Bali,

berikut hasil pembahasan antara lain Pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum OIS yang akan diselenggarakan pada 8-9 Juni 2026 di Bali dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai focal point penyelenggaraan event internasional tersebut. Dengan mengusung tema Unlocking the Potential of Blue Economy, forum OIS akan menjadi platform pertemuan global yang menghubungkan gagasan ekonomi biru dengan kebijakan, pembiayaan, dan aksi nyata yang berkelanjutan. OIS diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tapi juga menjadi ruang kerja bersama lintas negara dan lintas sektor.

13) Evaluasi pemanfaatan bantuan sarana dan pengembangan wisata bahari di Desa Wonokerto Kab Pekalongan

Tujuan Kegiatan : Untuk memastikan bantuan sarana prasarana wisata bahari berjalan dengan efektif dan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas wisata bahari, serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat lokal

Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Hasil Laporan Perjalanan Dinas :

1. Diskusi terkait pengembangan sarana prasarana Wisata Bahari yang telah diintervensi KKP sejak tahun 2021 hingga 2024 di Jawa Tengah antara lain berada di Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pekalongan. Potensi wisata bahari tersebut telah terkelola dengan mandiri yang menjadi model percontohan bagi pengembangan wisata bahari di Indonesia.
2. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2026 dan dipimpin oleh Ir.Lilik

Harnadi, M.Si, M.Sc..Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Wisata Bahari Bapak R. Bambang Adhitya N. dan Cornelio dari Direktorat Jasa Bahari.

3. Ir.Lilik Harnadi, M.Si, M.Sc..Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menekankan pentingnya melibatkan Dinas Provinsi dalam hal pengembangan wisata bahari baik mulai dari usulan proposal, pengecekan administrasi dan lapangan serta pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi program Dewi Bahari. Hal ini penting karena untuk mensinkronkan program-program yang ada di dinas provinsi ke dalam program pusat dalam hal ini bidang kelautan dan perikanan.
4. Kerjasama dan koordinasi antara pusat dan daerah pada umumnya Pusat langsung berkoordinasi ke level kabupaten sehingga banyak data dan informasi yang terlewat. Hal ini sangat disayangkan mengingat dinas Provinsi dapat membantu pusat terutama dalam hal pemetaan potensi desa, pengecekan status lahan dan pelaporan kondisi sosial ekonomi masyarakat didalamnya.
5. Direktorat Jasa Bahari mengharapkan bagi yang mendapat bantuan bisa rutin melaporkan progres pengembangan pengelolaan wisata bahari di Wonokerto per 3 bulan. Laporan tersebut penting karena KKP melalui Direktorat Jasa Bahari seringkali melakukan ekspose ke kementerian lain dan ditagih terkait progres laporan pengelolaan wisata, khususnya di Wonokerto Pekalongan.
6. KKP melalui Direktorat Jasa Bahari memiliki website dewi bahari yakni Website Desa Wisata KKP dimana kelompok pengelola bisa melaporkan data dan perkembangan progres wisata bahari di Pekalongan.
7. Pengelola wisata dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata bahari yang ada sebaiknya melibatkan level desa, kabupaten hingga provinsi dalam pelaporan dan pengelolaan wisata bahari.
8. Pada hari Jumat dan minggu pantai wonokerto bisa di kunjungi sekitar 3000-4000 wisatawan. Dan dalam 1 bulan rata rata kunjungan 20.000 orang dengan karcis masuk 5000 per orang, sekitar 10 Juta rupiah pendapatan per bulan dari karcis masuk.
9. Dalam 1 tahun pendapatan Desa Wisata Bahari wonokerto mendapatkan keuntungan 2,1 Milyar dari karcis, pondok kuliner, wisata pantai, camping ground dan permainan.
10. Dari total pendapatan keseluruhan 1 tahun sekitar 25 % masuk PAD, yakni 300 juta dalam setahun masuk ke PAD.
11. Kelompok ingin memberikan kontribusi ke Desa, namun bukan dalam bentuk uang ke pihak desa, akan tetapi hasil konkret seperti aksi sosial dan pembangunan fisik fasilitas desa, namun untuk menyalurkan hal tersebut kelompok pengelola wisata wonokerto perlu dasar aturan yang jelas dari desa terkait hal tersebut.
12. Desa Wisata Bahari Wonokerto pernah terlibat dalam Desa Wisata dari bank BRI untuk tingkat nasional.
13. Total tenaga kerja yang mengelola Wisata Bahari Wonokerto adalah sejumlah 22 orang
14. Pada saat jumlah kunjungan padat, pengelola wisata biasanya menyewa koki sebanyak 2 orang (150ribu/hari) untuk memasak. Selain itu, saat jumlah wisatawan sedang tinggi maka karyawan tidak boleh plibur atau cuti tujuannya untuk menjaga keamanan pantai.
15. Dana desa direncanakan akan masuk di tahun 2026 ini, selain itu pernah juga masuk dana provinsi (Daprov) sejumlah 25 juta di tahun 2024 untuk pembelian komputer.

16. Diperlukan aplikasi digital yang memadai dikarenakan sudah pernah ada aplikasi digital e ticketing di tahun 2025, namun ada kendala sinyal dan jumlah pengunjung yang terlalu banyak sehingga aplikasi mudah error.
17. Pengelola wisata berencana untuk mengembangkan digitalisasi penanaman cemara di sebelah barat pantai untuk melihat penanaman cemara bagi wisatawan.
18. Belum ada pelatihan digitalisasi bagi kelompok pengelola wisata di Wonokerto, Direktorat Jasa Bahari akan membantu hal ini dengan berkoordinasi dengan Kemendes.
19. Ada potensi perikanan bandeng, kerapu dan udang yang besar di wonokerto namun belum ada wadah untuk memasarkannya
20. Kelompok membutuhkan 250 juta untuk peninggian beton dan akses masuk jalan ke dalam pantai
21. Target tahun 2026 adalah betonisasi jalan akses masuk, renovasi mushola dan bekas mushola akan jadi kantor dan café, pengelola wisata ada terobosan untuk membuat live musik bagi anak-anak muda di hari jumat, dalam hal ini membutuhkan anggaran 300 juta, untuk jalan 250 juta dan untuk mushola 50 juta.
22. Pelatihan digitalisasi dan entrepreneurship perlu dilakukan kepada pengelola wisata Pantai Wonokerto.

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Persiapan pelaksanaan identifikasi potensi pengembangan wisata bahari.

3.1.4. IKK 4 PERSENTASE KARBON BIRU YANG TEREKISTER DALAM SISTEM REGISTRASI NASIONAL (%)

Karbon biru (*blue carbon*) merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang-surut. Pengukuran dan penghitungan total stok karbon dalam ton CO₂e yang terkandung dalam ekosistem pesisir (mangrove, lamun, rawa payau) Dalam rangka pengelolaan Karbon biru untuk keberlanjutan ekosistem yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, potensi karbon biru Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan melalui pemanfaatan jasa Sumber Daya Alam yang optimal, melalui perdagangan karbon biru .

1 meningkatkan pengelolaan potensi karbon biru dilakukan perdagangan karbon biru untuk keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut dan memberikan benefit bagi masyarakat. Dalam konteks perdagangan karbon biru, penyiapan kawasan ekosistem sebagai calon lokasi untuk proyek karbon biru sangat penting artinya. Penyiapan kawasan sebagai calon proyek karbon biru (*blue carbon*) sangat penting karena akan menentukan keberhasilan pengelolaan dan verifikasi penyerapan karbon dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya dokumen Keproyekan Karbon Biru yang dilakukan oleh calon proponent perlu untuk didaftarkan ke SRN (Sistem Registri Nasional). SRN berperan penting dalam pencatatan dan verifikasi pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek konservasi dan restorasi pesisir dan laut seperti hutan mangrove dan lamun. Dokumen DRAM (Dokumen Rencana Aksi Mitigasi) maupun LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi), sebagai dokumen kelengkapan yang merupakan persyaratan pendaftaran dilakukan verifikasi, dan mendapatkan persetujuan yang selanjutnya data pendaftaran karbon akan dicatat dan diintegrasikan ke dalam SRN.

Sebelum registrasi ke SRN, untuk melengkapi tata kelola perdagangan karbon biru, terdapat beberapa kondisi yang harus ada yaitu tersedianya seperti peta jalan perdagangan karbon biru, terbentuknya lembaga validasi/verifikasi (LV/V) yang memiliki sektor kelautan, serta Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam mendukung terlaksananya kegiatan.

Pada tahun 2026 sebagai landasan terlaksananya pencapaian IKK tersebut akan disusun **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru**, dengan kegiatan pendukung lainnya adalah : Menyusun Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Panduan Identifikasi Calon Lokasi Potensial Proyek Karbon Biru serta inisiasi pembentukan Lembaga Validasi/verifikasi.

Teknik Menghitung:

Dihitung melalui tercapainya tahapan pelaksanaan proses penyusunan dokumen Peta Jalan Perdagangan Karbon Biru, dan kegiatan lainnya untuk mendukung persiapan perdagangan karbon biru, salah satunya teregisternya dokumen keproyekan karbon biru (Project Design Document/PDD) atau sejenisnya dalam SRN.

Tabel 6 Capaian IKK Persentase Karbon Biru Yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)

SS - 2	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan							
IKK - 4	Persentase Karbon Biru Yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026*						Renstra DJPRL 2026-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	100	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada).
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- F. Kegiatan Pendukung:
 1. Telah dilaksanakan rapat persiapan Penyusunan Panduan Perdagangan Karbon Biru.
 2. Telah dilaksanakan rapat persiapan Penyusunan Kelembagaan LV/V
- G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
 1. Penyusunan Panduan Perdagangan Karbon Biru.
 2. Penyusunan Kelembagaan LV/V.

2.1.5. IKK 5 PRESENTASE PENYELESAIAN PERIJINAN BERUSAHA DIREKTORAT JASA BAHARI (%)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, berdasarkan tingkat resiko dari kegiatan usaha tersebut. Perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) dan melalui PTSA KKP.

Setiap perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis pelayanan perizinan di bidang Jasa Bahari, meliputi: Izin Pelaksanaan Reklamasi, Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan, Izin Wisata Bahari, Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan, Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan, Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan.

Teknik Menghitung:

Persentase Penyelesaian Perizinan : Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi / Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA x 100%

Tabel 7 capaian IKK Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Bahari (%)

SS - 3	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan							
IKK - 5	Presentase Penyelesaian Perijinan Berusaha Jasa Bahari (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026*						Renstra DJPRL 2026-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	100	100	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena merupakan IKU baru.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada).
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- F. Kegiatan Pendukung:
 - 1) Pembahasan Rencana Kerja Perizinan Berusaha Jasa Bahari dan Pengelolaan Reklamasi Tahun 2026
 - 2) Asistensi Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi PT Bintan Inti Industrial Estate

- 3) Asistensi Perizinan Berusaha Wisata Bahari PT Millenium Permata Indah di Pulau Tunda, Kab. Serang
- 4) Praktek Penggunaan Drone dalam Pemetaan Pesisir di Kota Depok
- 5) Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Wisata Bahari atas nama Herly
- 6) Verifikasi Teknis Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi an PT Bintang Inti Industrial
- 7) Pembahasan Identifikasi Reklamasi Hasil Pengawasan

G. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Penyusunan rencana kegiatan pelayanan berusaha Jasa Bahari.
- 2) Melakukan asistensi dan pendampingan lebih intensif kepada pelaku usaha.

3.1.6. IKK 6 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT JASA BAHARI (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Jasa Bahari. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jasa Bahari.

Teknik Menghitung:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari
- A : Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Jasa Bahari
- B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Jasa Bahari

Tabel 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)

SK-4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari	
IKK - 6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. Jasa Bahari (%)	
Tahun 2025	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
95,2	99,50	0,04	120	81	120	81%	84%	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 99,50 dari target sebesar 81 atau sama dengan 120% capaian ini diperoleh berdasarkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang diselesaikan Tuntas pada aplikasi SIDAK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 0,04 %.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Perbandingan capaian triwulan I tahun 2026 jika dibandingkan dengan target renstra lebih tinggi sebesar 14,24 %.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

Tidak terdapat standar nasional/target nasional/target internasional.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawabnya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Rekonsiliasi SAKTI satker lingkup DJPK dan DJPRL dengan UAPPA-E1 Periode tahunan TA 2025 pada 12-15 Januari 2026
- 2) Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen pada Satker lingkup DJPK pada 18 - 20 Februari 2026
- 3) Pemantauan Lanjutan Percepatan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen lingkup DJPK pada 25 – 27 Februari 2026
- 4) Pembahasan penetapan akun signifikan PIPK TA 2026 lingkup DJPK pada 12-13 Maret 2026
- 5) Monitoring Lanjutan Penyelesaian dan Percepatan TL Pengawasam APIP dalam rangka Penilaian TL Pengawasan APIP TW 1 TA 2026 lingkup DJPK pada 31 Maret 2026

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

* Menyelesaikan rekomendasi yang masih belum tuntas

3.1.7. IKK 7 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Jasa Bahari yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jasa Bahari Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern

Teknik Menghitung:

$$X_{penyelesaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

X penyelesaian : Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari

A : Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK

B : Jumlah nilai temuan BPK

Tabel 9. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit Jasa Bahari (%)

SK-3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari							
IKK - 7	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit Jasa Bahari (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
100	-	-	-	-	-	100%	100%	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan tercapainya indikator ini didukung oleh komitmen seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal, dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan. Analisis keberhasilan lainnya juga didukung oleh koordinasi dengan Tim Inspektorat I sebagai Mitra Direktorat Pengelolaan Kelautan terkait dokumen yang harus disiapkan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- G. Kegiatan Pendukung
1. Percepatan penyelesaian penyusunan dokumen kerugian negara PDTT PDLN TA 2023-2025 pada 9-11 Maret 2026.
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
- 1) Menindaklanjuti seluruh temuan atas rekomendasi BPK
 - 2) Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
 - 3) Koordinasi dengan penanggungjawab untuk penyelesaian rekomendasi

3.1.8. IKK 8 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Jasa Bahari merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Jasa Bahari.

Teknik Menghitung:

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Berikut predikat nilai SAKIP:

Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Bahari sebagai berikut:

$PMSAKIP = PerencKinerja(30\%) + PengukKinerja(30\%) + PelapKinerja(15\%) + EvalKinerja(25\%)$

Keterangan:

PerencKinerja : perencanaan kinerja
(30%) PengukKinerja : pengukuran kinerja
(30%) PelapKinerja : pelaporan kinerja

(15%) EvalKinerja : evaluasi kinerja
(25%)

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 10. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)

SS-4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dit JASA BAHARI)							
IKK - 8	Nilai PM SAKIP lingkup Dit JASA BAHARI ('Nilai)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
80,95	-	-	-	-	-	72	78	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan tercapainya IKU PM SAKIP ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

H. Kegiatan Pendukung

- 1) Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPK Tahun 2026 (14 - 15 Januari 2026)
- 2) Pembahasan *Modeling Artificial Intelligence* (AI) lingkup DJPK (20 Januari 2026)
- 3) Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2026 lingkup DJPK (21 Januari 2026)
- 4) Pembahasan Manual Indikator DJPK Tahun 2026 (23 Januari 2026)
- 5) Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Langkah Strategis Belanja K/L pada TA 2026 lingkup DJPK (24 Februari 2026)
- 6) Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Proses Pembukaan Blokir Anggaran lingkup DJPK TA 2026 (27 Februari 2026)
- 7) Rapat Pimpinan Lingkup DJPK : Evaluasi dan Pembahasan Rencana Kerja BulanMaret (2 Maret 2026)
- 8) Pembahasan dokumen perencanaan kinerja tahun 2026 lingkup DJPK (5-6Maret 2026) dan (10-11 Maret 2026)

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPK Triwulan I Tahun 2026
- 2) Verifikasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja DJPK Triwulan I Tahun 2026
- 4) Persiapan data AKIP dan PM SAKIP di lingkup DJPK.

3.1.9. IKK 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (INDEKS)

Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- 4) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026

Teknik Menghitung:

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari sebagai berikut:

Laporan SPIP2026 = A1 + A2 + A3 + A4

dimana,

A1 = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A2 = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A3 = Laporan SPIP Triwulan III 2026

A4 = Laporan SPIP Triwulan IV 2026

Tabel 11. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (indeks)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dit JASA BAHARI)							
IKK - 8	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. JASA BAHARI (Dokumen)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
1 Dokumen	1 Dokumen	-	100%	1	100%	4 Dokumen	-	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026 sesuai dengan target dokumen.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 Capaian pada triwulan I tahun 2026 sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2025, sebanyak satu dokumen.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

IKK ini tidak terdapat dalam renstra sehingga capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 tidak bisa dibandingkan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 pencapaian IKU ini melibatkan seluruh ASN dan Non ASN lingkup DJPK dengan didukung oleh sarana dan prasana yang memadai dalam kegiatan SPIP.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;

2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

G. Kegiatan Pendukung

Penyusunan Manajemen Risiko atas Penetapan Konteks Prioritas dan Manajerial serta
Persiapan Pemantauan MR TA 2026 Lingkup DJPK pada 4 - 6 Maret 2026.

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Menyusun laporan SPIP pada periode berikutnya
- 2) Melakukan pemantauan MR dan kegiatan tahun 2026

3.1.10. IKK 10 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (INDEKS)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Teknik Menghitung:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- ☐ Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- ☐ Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- ☐ Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- ☐ Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- ☐ Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
- ☐ SLTA Sederajat; dan
- ☐ Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5

0	Pendidikan SMP/SD	1
---	-------------------	---

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ✓ Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

IPP3K = Rata-rata Nilai *IPASN* lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN

dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- ☐ PNS; dan
- ☐ PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- ☐ Calon PNS (CPNS);
- ☐ Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- ☐ Dipekerjakan (DPK); dan
- ☐ Tugas Belajar Dibiayai

Tabel 12. Capaian IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. JASA BAHARI (Indeks)

SS-4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari							
IKK - 13	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
85,83	-	-	-	-	-	81	84	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target semesteran sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa aspek yakni :
 1. Keaktifan seluruh pegawai di lingkup Ditjen PK dalam hal peningkatan kompetensi.
 2. Sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin. serta keaktifan seluruh pegawai lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dalam mengikuti peningkatan kompetensi dan juga melakukan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai melalui riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah

satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- G. Kegiatan Pendukung
 - 1. Penyusunan SKP pegawai lingkup Direktorat Jasa Bahari
 - 2. Pelaporan LHKPN dan LHKASN
 - 3. Monitoring absensi pegawai lingkup Direktorat Jasa Bahari
 - 4. Penyusunan rencana peningkatan kompetensi pegawai lingkup Ditjen PK
 - 5. Pengisian SKP Tahun 2025
 - 6. Penilaian SKP tahun 2025
 - 7. Pengusulan kenaikan pangkat periode TW I
 - 8. Penyampaian usulan penghargaan Satya Lancana Karya Satya lingkup Direktorat Jasa Bahari Tahun 2026
- H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
 - 1. Penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja BKN triwulan I tahun 2026.
 - 2. Penilaian umpan balik 360⁰ aplikasi portal pegawai KKP.
 - 3. Layanan usulan kenaikan pangkat pegawai lingkup Direktorat Jasa Bahari .
 - 4. Monitoring presensi pegawai triwulan I tahun 2026 lingkup Direktorat Jasa Bahari
 - 5. Peningkatan kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan

3.1.11. IKK 11 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA BAHARI (NILAI)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- 1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi: a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
- 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
- 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Bahari akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Bahari merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
- b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

$$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 = \text{Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.}$$

$$b_1 = \text{Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis masing masing komponen subaspek 25\%}$$

$$A_1 = \text{Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.}$$

$$\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2 = \text{Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan}$$

$$b_2 = \text{Bobot pada 2 komponen atau sub aspek pada aspek sumber daya kearsipan Dimana bobot masing masing komponen 50\%}$$

$$A_2 = \text{Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.}$$

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
DD	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 13. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)

SS-4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari							
IKK - 11	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. Jasa Bahari (Nilai)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 1	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 1	Target TW 1	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
94	-	-	-	-	-	81	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang memiliki target tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 maka, capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2026 belum bisa dibandingkan karena, pada triwulan I tahun 2026 indikator kinerja ini belum memiliki capaian.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

Tidak terdapat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 karena tidak ada standar nasional, target nasional, maupun target internasional.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan memenuhi 5 komponen indikator dalam aspek penilaian SAQ Monev KIP oleh tim penilai internal KKP diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana dan prasarana, kelembagaan, digitalisasi. Masing-masing komponen indikator mempunyai bobot penilaian masing-masing yang akan ditentukan oleh tim penilai internal KKP.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Menghadiri Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada 20 Januari 2026 di Wisma Gracillaria
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk penyesuaian OTK UPT 3 Es 1 masih proses SIASN yang baru, setelah itu
- 2) Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Menindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/BA.01.00/2/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Informasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2026 sehingga Setiap Eselon Masing Masing mengusulkan mansoskul

- 3) Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan arsip serta memperkuat integrasi data kearsipan nasional, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan SIKN dan JIKN pada tanggal 11 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pengelola arsip di instansi pemerintah mengenai tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem informasi kearsipan berbasis digital.

Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi pengelola arsip dalam penggunaan SIKN dan JIKN
2. Menstandarkan proses input, pengolahan, dan publikasi arsip digital.
3. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam jaringan informasi kearsipan nasional
4. Mendukung keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola arsip nasional berbasis digital. Dengan meningkatnya kapasitas pengelola arsip, diharapkan SIKN dan JIKN dapat berfungsi optimal sebagai sarana integrasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi kearsipan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- 4) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan tahun 2026 dilaksanakan pada 18 Februari 2026. Narasumber dari Anri, Pengawasan kearsipan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintah. Untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kompetensi sekaligus forum berbagi pengalaman antar pengelola arsip.

Tujuan

- Memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan standar pengawasan kearsipan.
- Melatih aparatur dalam menyusun instrumen pengawasan kearsipan.
- Meningkatkan keterampilan analisis hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Mendorong terciptanya budaya tertib arsip di seluruh instansi pemerintah.
- Menjadi Tim Pengawasan Harus Bersertifikat dari ANRI serta berkompeten

Kegiatan Bimtek Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola arsip. Dengan penguasaan instrumen dan teknik pengawasan, diharapkan setiap instansi mampu menjaga tertib arsip, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bersertifikat dari ANRI.

- 5). Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal untuk pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dihadiri peserta Pejabat Fungsional Arsiparis dan Kepala Bagian Umum pada Unit Kearsipan II, serta Pejabat Fungsional Arsiparis dan Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Kearsipan II.

Pengawasan kearsipan internal merupakan bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan tertib arsip, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Persiapan pengawasan dilakukan untuk menilai kesiapan unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan arsip, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat efektivitas tata kelola arsip.

Tujuan

- Menyusun rencana kerja pengawasan kearsipan internal tahun 2026.
- Menyiapkan instrumen pengawasan sesuai standar ANRI.
- Mengidentifikasi unit kerja prioritas yang akan diawasi.
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam rangka tertib arsip.
- Menjamin kesiapan data dan dokumen pendukung sebelum pelaksanaan pengawasan. Kegiatan Persiapan

Koordinasi Awal: Rapat internal untuk menentukan ruang lingkup pengawasan.

Penyusunan Instrumen: Menyusun checklist pengawasan kearsipan sesuai standar ANRI.

Inventarisasi Arsip: Mengidentifikasi arsip aktif, inaktif, dan vital di setiap unit kerja.

Sosialisasi: Memberikan arahan kepada unit kerja terkait persiapan dokumen.

Simulasi Pengawasan: Uji coba instrumen pengawasan pada satu unit kerja sebagai pilot project.

Hasil Persiapan

- Instrumen pengawasan kearsipan internal telah disusun dan disepakati.
 - Unit kerja telah menerima arahan dan daftar dokumen yang harus disiapkan.
 - Pilot project simulasi pengawasan menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek pencatatan arsip elektronik.
 - Jadwal pengawasan internal ditetapkan untuk periode Maret s.d Juni 2026. Jadwal Pengawasan Kearsipan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026
- 6). Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026
- Hasil Pengawasan Tahun 2025 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sebesar 96,23 (sembilan puluh enam koma dua puluh tiga) kategori “AA (Sangat Memuaskan)” Tahun 2024 sebesar 95,23 (sembilan puluh lima koma dua puluh tiga) kategori “AA (sangat memuaskan) Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 sebesar 94,91 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu) kategori “AA (Sangat Memuaskan)” Tahun 2024 sebesar 88,69 (delapan puluh delapan koma enam puluh Sembilan) kategori “A (memuaskan)

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Bahari hingga triwulan I Tahun 2026 masih 1 (satu) DIPA dan kegiatan dengan Direktorat Jasa Bahari adalah Rp.178.230.000,- dari total anggaran Rp. 2.135.641.000,- atau sebesar 8,35%.

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Bahari Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Bahari Tahun 2026 terdapat 11 Indikator Kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja Direktorat Sumberdaya memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2026 adalah sebesar **112% (Istimewa)**. Dari 11 indikator kinerja tersebut ada 2 IKK yang memiliki target indikator kinerja pada triwulan I 2026, 1 IKK telah melampaui target, dan 1 indikator kinerja telah mencapai target dengan baik.

Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025: Direktorat Jasa Bahari merupakan Direktorat baru sehingga tidak terdapat rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2025 periode sebelumnya.

Tabel 23 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Jasa Bahari Tahun 2024

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Jasa Bahari Tahun 2024	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026
1	Menyajikan Dokumen Rencana Aksi yang sesuai khususnya pada aspek total anggaran dalam rencana aksi yang selaras dengan nilai anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja	Telah ditindaklanjuti
2	Menindaklanjuti perubahan anggaran dengan membuat Nota Dinas usulan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Setditjen	Telah ditindaklanjuti
3	Penyelesaian Tindak lanjut rekomendasi dan data dukung	Telah ditindaklanjuti

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026:

Rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jasa Bahari sebagai berikut :

1. Percepatan realisasi anggaran lingkup Direktorat Jasa Bahari.
2. Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan di lingkup Direktorat Jasa Bahari.
3. Pemenuhan Dokumen Penilaian AKIP.

Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JASA BAHARI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Enggar Sadtopo**

Jabatan : Direktur Jasa Bahari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Jasa Bahari



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Enggar Sadtopo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JASA BAHARI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Bahari Berkelanjutan	1. Lokasi Pemanfaatan Bangunan dan Instalasi Laut yang sudah tidak beroperasi (Lokasi)	1
		2. Lokasi yang dilakukan pengendalian reklamasi (kumulatif) (Lokasi)	1
		3. Kawasan Wisata Bahari yang dikelola (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Potensi Karbon Biru yang diperdagangkan	4. Persentase Karbon Biru yang Teregister Dalam Sistem Registri Nasional (%)	100
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Jasa Bahari	5. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Jasa Bahari (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jasa Bahari	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Jasa Bahari (%)	81
		7. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Jasa Bahari (%)	100
		8. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	72
		9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Bahari (Dokumen)	4
		10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jasa Bahari (Indeks)	81
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Jasa Bahari (Nilai)	81

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Jasa Bahari	3.000.000.000
2.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	10.000.000.000
3.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Jasa Bahari	1.100.000.000
Total Anggaran Direktorat Jasa Bahari Tahun 2026		14.100.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Jasa Bahari



Ditandatangani
Secara Elektronik

Enggar Sadtopo

